



PUTUSAN

Nomor 153/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. LEE COOPER INDONESIA, tempat kedudukan di Graha Fatmawati Nomor 1E, F, G Lt. 3, Jalan RS. Fatmawati RT. 005 RW. 009, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, diwakili oleh Jody Dharmawan, selaku Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1703/ PJ./2013 tanggal 28 Desember 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.32894/PP/M.III/15/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-450/WPJ.07/2007 tanggal 30 April 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00022/206/07/056/09 tanggal 10 November 2009 yang dikenakan kepada Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 yang dikenakan kepada Pemohon Banding telah ditolak oleh Terbanding;

Bahwa peredaran usaha dan biaya usaha menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah sebagai berikut:

	SKPKB/Kep. Keberatan (Rp.)	SPT Pemohon Banding (Rp.)
Peredaran Usaha	59.336.757.258,00	46.791.569.854,00
Biaya Usaha	41.025.377.813,00	28.288.829.847,00

Dasar koreksi pemeriksa:

1. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas peredaran usaha karena menurut Pemeriksa terdapat biaya komisi yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada *Departement Store*/toko, namun biaya komisi tersebut dijadikan sebagai pengurang harga jual barang dagangan;
2. Bahwa komisi yang dibayarkan oleh Pemohon Banding bukan merupakan diskon penjualan atau potongan penjualan tetapi merupakan pembayaran sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan kasir;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemeriksa melakukan koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp12.540.052.452,00 dan di lain pihak melakukan koreksi negatif biaya usaha sejumlah yang sama;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas Peredaran Usaha dan Biaya Usaha dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan;
2. Bahwa dalam transaksi jual beli Pemohon Banding tidak melakukan penjualan langsung kepada konsumen, tetapi melalui distributor dalam hal ini *Departement Store*;
3. Bahwa untuk kepentingan bisnis Pemohon Banding dalam strategi pemasaran membuat kebijakan bahwa harga jual produk *Lee Cooper* kepada konsumen akhir harus sama di setiap *department store*. Oleh karena itu, maka harga jual produk *Lee Cooper* kepada konsumen akhir di *Departement Store* ditentukan oleh Pemohon Banding, sedangkan harga jual Pemohon Banding kepada *Departement Store* ditentukan sesuai dengan kesepakatan transaksi jual beli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam pengakuan pendapatan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, maka Pemohon Banding mengakui pendapatan sebesar harga jual antara Pemohon Banding dengan *departement store*, sedangkan selisih harga jual kepada konsumen akhir dibandingkan dengan harga jual ke *departement store* bukan merupakan biaya bagi Pemohon Banding karena jumlah tersebut merupakan keuntungan bagi departemen store;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.32894/ PP/M.III/15/2011 tanggal 04 Agustus 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-450/WPJ.07/2010 tanggal 30 April 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00022/206/07/056/09 tanggal 10 November 2009, atas nama: PT. Lee Cooper Indonesia, NPWP: 02.414.675.5- 056.000, alamat: Graha Fatmawati Nomor 1E, F, H Lt. 3, Jalan RS. Fatmawati, RT. 005 RW. 009, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.32894/PP/M.III/ 15/2011 tanggal 04 Agustus 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1358/SP.51/AB/XI/2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 November 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/2014



Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim tidak adil dan nyata-nyata putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkenankanlah kami untuk memberikan tanggapan secara lebih mendetail mengenai pernyataan dan pendapat Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Banding Nomor Put.32894/PP/M.III/15/2011 pada tanggal 4 Agustus 2011.

1. Pernyataan Pemohon terhadap Pokok Sengketa Pajak.

Terdapat beberapa ketidakadilan dan mengesampingkan fakta dan substansi transaksi yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pokok sengketa pajak kami. Akibatnya adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum kami uraikan lebih mendetail, akan kami ringkaskan beberapa hal dilanggar oleh Majelis Hakim yaitu:

a. Adanya ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam memutus perkara.

Majelis Hakim tidak konsisten dalam memutuskan perkara, dimana pada bagian awal putusan pengadilan pajak dikatakan bahwa koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp12.545.187.404,00 dan bukan koreksi negatif biaya usaha sebagaimana disebutkan dalam putusan Majelis Hakim. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam memutus perkara yang disengketakan sehingga seharusnya putusan ini batal demi hukum.

b. Ketidakadilan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangan substansi sengketa Pajak.

Majelis hakim secara nyata mengesampingkan substansi materi sengketa pajak, dan hanya melihat kepada form (tampilan) yang ada dalam dokumen tanpa mau mempertimbangkan substansi materi transaksi yang kami lakukan. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan pajak kami rasakan melanggar prinsip keadilan bagi wajib pajak.

c. Majelis Hakim tidak memperhatikan putusan pengadilan pajak yang substansi transaksinya sama dengan yang dihadapi oleh Pemohon Peninjauan Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada saat memutuskan perkara tidak berkenan untuk melihat kembali putusan-putusan pengadilan pajak yang telah memutuskan kasus yang sama yang dihadapi oleh kami. Berdasarkan penelusuran terhadap putusan pengadilan terdahulu dapat kami ringkas sebagai berikut:

No.	Nomor Putusan Pengadilan Pajak Terdahulu	Pokok Sengketa Pajak dan Jenis Pajak	Putusan Pengadilan Pajak
1	Put.11369/PP/M.II/16/2007	SKPKB PPN – Koreksi DPP PPN, Transaksi dengan <i>Department Store</i> oleh pemeriksa pajak dikategorikan sebagai penyerahan konsinyasi.	Koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan.
2	Put.09374/PP/M.IV/16/2006	SKPKB PPN – Koreksi DPP PPN, Adanya koreksi DPP PPN terkait dengan koreksi atas diskon kepada <i>Department Store</i> .	Koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan.
3	Put.09375/PP/M.IV/16/2006	SKPKB PPN – Koreksi DPP PPN, Adanya koreksi DPP PPN terkait dengan koreksi atas diskon kepada <i>Department Store</i> .	Koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan.
4	Put.08440/PP/M.XI/16/2006	SKPKB PPN – Koreksi DPP PPN, adanya koreksi DPP PPN terkait konsinyasi di <i>Department Store</i> .	Koreksi Terbanding dipertahankan
5	Put.00211/BPSP/M.II/12/1998	SKPKB PPh Pasal 23 – Koreksi Objek PPh Pasal 23, terkait Potongan Penjualan yang dijadikan objek pajak Pasal 23.	Koreksi terbanding dipertahankan sebagian.
6	Put.01489/PP/M.II/12/2003	SKPKB PPh Pasal 23 – Koreksi Objek Pasal 23, terkait koreksi potongan harga dianggap sebagai jasa perdagangan.	Koreksi harus dibatalkan.
7	Put.09991/PP/M.III/12/2007	SKPKB PPh Pasal 23 – Koreksi Objek Pasal 23, terkait koreksi potongan harga dianggap komisi kepada pedagang perantara.	Koreksi tidak dapat dipertahankan.

Dengan membandingkan putusan pengadilan pajak atas kasus kami dan dan putusan pengadilan pajak terdahulu, kami merasakan kondisi ketidakadilan bagi wajib pajak.

2. Berikut ini kami uraikan lebih mendetail mengenai hal-hal yang diabaikan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa pajak ini.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32894/PP/M.III/15/2011 tanggal 4 Agustus 2011, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

2.a. Terdapat ketidak konsistenan Majelis Hakim.

Terdapat ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sengketa perpajakan ini, dimana alasan koreksi menurut Majelis Hakim pada halaman 5 angka 2 2 adalah koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp12.545.187.404,00, bukan koreksi negatif biaya usaha sebagaimana disebutkan dalam putusan Majelis Hakim:

Halaman 24 alinea ke-7:

”... dan koreksi negatif atas biaya usaha sebesar (Rp12.435.109.966,00) dan koreksi dipertahankan”;

Halaman 5 dari 45 halaman. Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/2014



Dalam putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan diatas, terdapat ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam memutus perkara, dimana dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdapat koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp12.545.187.404,00, sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan adanya koreksi negatif biaya usaha.

Dengan adanya perubahan alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mempertahankan keputusan terbanding maka kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim harus dapat dibatalkan demi hukum dan keadilan.

Untuk itu kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip keadilan material telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dengan mengabaikan kenyataan bahwa prinsip-prinsip perpajakan dan akuntansi serta metode pemasaran telah dikesampingkan dalam pengambilan putusan.

2.b. Ketidakadilan Majelis Hakim Yang Tidak Mempertimbangan Substansi Sengketa Pajak.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan substansi transaksi sengketa pajak yang menyebabkan putusan Majelis Hakim menjadi tidak adil. Hal ini tertuang dalam

Halaman 23 alinea ke-11:

”Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga Nomor LAP-257/PL/WPJ.07/KP.040/II.2/2009 tanggal 9 November 2009 diketahui terbanding melakukan koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp12.545.187.404,00 yang terdiri dari penjualan barang yang belum dilaporkan sebesar Rp12.540.052.452,00 dan equalisasi dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.134.952,00”;

Halaman 24 alinea ke-1:

“Bahwa menurut Terbanding, penjualan barang yang belum dilaporkan sebesar Rp12.540.052.452,00 merupakan biaya komisi yang dibayarkan kepada *department store*/toko dan *franchise* yang dijadikan oleh Pemohon Banding sebagai unsur pengurang pada harga jual barang dagangan, sedangkan seharusnya biaya komisi tersebut adalah unsur biaya penjualan sehingga biaya komisi ini dikoreksi negatif pada pengurang penghasilan bruto, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.134.952,00 adalah equalisasi dengan dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk membatalkan koreksi Terbanding. Kami telah menyerahkan sampel dokumen pendukung pada saat pemeriksaan, keberatan, dan kami juga menghadiri sidang beberapa kali. Ketidakhadiran kami pada sidang-sidang banding bukanlah merupakan suatu keadaan yang menyebabkan Majelis Hakim tidak berkenan untuk mempertimbangkan substansi masalah yang terjadi. Kondisi inilah yang menurut pemohon peninjauan kembali memberikan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan ketidakhadiran kami dalam persidangan, kami menyadari terdapat kelalaian yang dilakukan oleh konsultan kami, dan atas kelalaian ini kami akan mengajukan tuntutan kepada mereka. Mohon kiranya kondisi ini dapat dipertimbangkan sehingga seharusnya Majelis Hakim tidak hanya melihat ketidakhadiran sebagai sesuatu yang menutup segala pintu untuk mencari keadilan dan kebenaran material atas pokok sengketa pajak tersebut diatas.

Atas pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak setuju substansi koreksi yang dilakukan Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sebagaimana tercantum dalam surat keterangan yang diberikan oleh *department store* dinyatakan bahwa harga yang tertera dalam label harga yang dibuat oleh PT Lee Cooper Indonesia merupakan harga jual perusahaan kami kepada konsumen dan kami sudah membayar PPN-nya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila kami mengikuti koreksi yang dilakukan terbanding maka akan terjadi pemungutan PPN yang *double*, dimana kami diharuskan memungut PPN sebesar 100 % harga bruto sesuai *invoice* dan *department store* juga akan melakukan hal yang sama pada saat menjual produk tersebut kepada konsumen akhir. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketidakadilan dan menyebabkan biaya tinggi dalam transaksi usaha yang merupakan kelaziman umum dalam kegiatan usaha.

Halaman 7 dari 45 halaman. Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/2014



- b. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat tidak setuju dengan koreksi peredaran usaha tahun pajak 2007 sebesar Rp12.540.052.452,00 berasal dari koreksi nilai penjualan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak berasal dari koreksi atas keuntungan/margin yang kami berikan kepada *department store/toko* yang dianggap tidak dapat dikurangkan dari harga jual kepada *department store/toko* tetapi merupakan biaya komisi. Dengan adanya koreksi keuntungan/margin yang kami berikan kepada *department store/toko* yang dianggap sebagai biaya komisi tersebut, pemeriksa melakukan koreksi negatif biaya komisi dengan mengakui keuntungan/margin yang kami berikan kepada *department store/toko* sebagai biaya komisi sebesar Rp12.540.052.452,00. Dengan tidak setujunya kami terhadap koreksi peredaran usaha yang berasal dari tidak diakuinya keuntungan/margin yang kami berikan kepada *department store/toko* sebagai pengurang harga penjualan kepada *Department Store/Toko*, maka kami juga tidak setuju dengan koreksi negatif yang terkait dengan koreksi pemeriksa yang menyatakan bahwa keuntungan/margin yang kami berikan kepada *department store/toko* diperlakukan sebagai biaya komisi.
- c. Perlu kami jelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan; dan dalam transaksi jual beli Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penjualan langsung kepada konsumen akhir, penjualan langsung kepada konsumen akhir dilakukan oleh distributor dalam hal ini adalah *Department Store/Toko*.
- d. Bahwa untuk kepentingan bisnis Pemohon Peninjauan Kembali dalam strategi pemasaran membuat kebijakan bahwa harga jual produk Lee Cooper kepada konsumen akhir harus sama di setiap *department store/toko*. Oleh karena itu, maka harga jual produk Lee Cooper kepada konsumen akhir di *Department Store/Toko* ditentukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan harga jual Pemohon Peninjauan Kembali kepada *Department Store* ditentukan sesuai dengan kesepakatan transaksi jual-beli;
- e. Transaksi penyerahan barang dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada *Department Store/Toko* merupakan transaksi jual-beli antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store/Toko*, hal ini dibuktikan dengan seluruh *invoice* penjualan dan Faktur Pajak diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas nama *Department Store/Toko*;



- f. Tidak terdapat pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada *Department Store*/Toko disebabkan karena memang tidak terdapat transaksi jasa penyediaan tempat dan kasir oleh *Department Store*/Toko kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- g. Koreksi Pemeriksa dengan alasan terdapat pembayaran komisi oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada *Department Store*/Toko tidak tepat. Selisih harga jual kepada konsumen akhir dibandingkan harga beli dari Pemohon Peninjauan Kembali merupakan keuntungan bagi *Department Store*/Toko;
- h. Pengurangan harga yang kami berikan kepada *department store*/ toko bukan merupakan komisi, tetapi keuntungan/margin yang diberikan kepada *Department Store*/toko dan ini ditampilkan dalam *invoice* dengan maksud sebagai internal kontrol dan sebagai *cross check* untuk *department store*/ toko mengingat jumlah diskon setiap barang berbeda-beda. Lebih lanjut bahwa istilah komisi dalam *invoice* seharusnya diartikan sebagai keuntungan/margin kepada *Department Store*/Toko, sedangkan istilah diskon dalam *invoice* merupakan diskon kepada konsumen akhir. Hal ini terkait dengan strategi bisnis yang kami lakukan dimana harga jual produk kepada konsumen akhir harus sama untuk seluruh *Department Store*/toko, sedangkan keuntungan yang diperoleh *Department Store*/Toko adalah sebesar keuntungan/margin harga yang kami berikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- i. Penggunaan kata komisi dalam *invoice* kepada distributor/ *department store*/toko merupakan kesalahan penggunaan istilah oleh Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari PT. Matahari Putra Prima yang menyatakan bahwa dalam transaksi dengan Pemohon Peninjauan Kembali, PT. Matahari Putra Prima tidak mendapatkan komisi.
- j. Untuk memperkuat pendapat ini, kami menyampaikan sampel dokumen *invoice* penjualan sebagai berikut:
 - 1) *Invoice* kepada PT Matahari Putra Prima nomor LC07-000875 tanggal 31 Oktober 2007, disebutkan data sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp.)
Penjualan <i>Lee Cooper</i> Periode 1 sd 31 Oktober	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007	28.17%
MDS Ladis Citraland	78.39%
MDS Balikpapan	106.57%
Diskon 0 %	106.57%
Komisi 31 %	31.97%
Penjualan Bersih	74.59%

Dari sampel *invoice* diatas, dapat secara jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan makna dan maksud yang jelas, dimana diskon dimaksudkan sebagai potongan harga yang dinikmati oleh konsumen akhir, sedangkan komisi merupakan istilah yang digunakan untuk keuntungan/margin yang diberikan kepada *Department Store*/toko terkait dengan penetapan harga jual kepada konsumen akhir yang harus seragam untuk seluruh *department store*/toko yang menjual produk perusahaan. "Komisi" atau keuntungan/margin bagi *department store*/toko dihitung dari harga setelah "diskon" yang diberikan kepada konsumen akhir. Perlakuan ini juga sejalan dengan *agreement* yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store*/Toko dimana Pemohon Peninjauan Kembali harus tidak boleh lebih mahal dibandingkan harga jual di *Department Store*/toko lainnya. Penggunaan istilah komisi dalam *invoice* hanya untuk membedakan antara potongan harga yang diterima konsumen akhir dan *department store*/toko. Komisi yang tertera di *invoice* merupakan keuntungan/margin yang diberikan kepada *Department Store*/toko. Hal ini diperkuat oleh contoh perhitungan diskon yang diperoleh oleh *Department Store*/Toko sebagaimana menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam *agreement* kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store*/Toko, dimana pengurang harga yang diperoleh merupakan keuntungan/margin bagi *department store*/toko, walaupun dalam *invoice* tertulis kata komisi.

- 2) *Invoice* kepada PT Matahari Putra Prima Nomor LC07-000876 tanggal 31 Oktober 2007, disebutkan data sebagai berikut:



Keterangan	Jumlah (Rp.)
Penjualan Lee Cooper Periode 1 sd 31 Oktober 2007	960
MDS Balikpapan	960
Diskon 10 %	870
Komisi 26 %	251
Penjualan Bersih	619

Dari sampel *invoice* diatas, dapat secara jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan makna dan maksud yang jelas, dimana diskon dimaksudkan sebagai potongan harga yang dinikmati oleh konsumen akhir, sedangkan komisi merupakan istilah yang digunakan untuk keuntungan/margin yang diberikan kepada *Department Store*/toko terkait dengan penetapan harga jual kepada konsumen akhir yang harus seragam untuk seluruh *department store*/toko yang menjual produk perusahaan. "Komisi" atau keuntungan/margin bagi *department store*/toko dihitung dari harga setelah "diskon" yang diberikan kepada konsumen akhir. Perlakuan ini juga sejalan dengan *agreement* yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store*/Toko dimana Pemohon Peninjauan Kembali harus tidak boleh lebih mahal dibandingkan harga jual di *Department Store*/toko lainnya. Penggunaan istilah komisi dalam *invoice* hanya untuk membedakan antara potongan harga yang diterima konsumen akhir dan *department store*/toko. Komisi yang tertera di *invoice* merupakan keuntungan/margin yang diberikan kepada *Department Store*/toko. Hal ini diperkuat oleh contoh perhitungan diskon yang diperoleh oleh *Department Store*/Toko sebagaimana menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam *agreement* kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store*/Toko, dimana pengurang harga yang diperoleh merupakan keuntungan/margin bagi *department store*/toko, walaupun dalam *invoice* tertulis kata komisi.

- 3) *Invoice* kepada PT Benua Hampan Luas Nomor LC07-000445 tanggal 30 Juni 2007, disebutkan data sebagai berikut:



Keterangan	Jumlah (Rp.)
Penjualan <i>Lee Cooper</i> Periode 1 sd 30 Juni 2007	23.594.000,00
Diskon 0 %	23.5
Komisi 31,50 %	7.4
Penjualan Bersih	16.1
Penjualan <i>Lee Cooper Sale</i> 10 %	7
Diskon 10 %	6
Komisi 31,50 %	2
Penjualan Bersih	4
Total Penjualan Bersih	16.6

Dari sampel *invoice* diatas, dapat secara jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan makna dan maksud yang jelas, dimana diskon dimaksudkan sebagai potongan harga yang dinikmati oleh konsumen akhir, sedangkan komisi merupakan istilah yang digunakan untuk keuntungan/margin yang diberikan kepada *Department Store*/toko terkait dengan penetapan harga jual kepada konsumen akhir yang harus seragam untuk seluruh *department store*/toko yang menjual produk perusahaan. "Komisi" atau keuntungan/margin bagi *department store*/toko dihitung dari harga setelah "diskon" yang diberikan kepada konsumen akhir. Perlakuan ini juga sejalan dengan *agreement* yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store*/Toko dimana Pemohon Peninjauan Kembali harus tidak boleh lebih mahal dibandingkan harga jual di *Department Store*/toko lainnya. Penggunaan istilah komisi dalam *invoice* hanya untuk membedakan antara potongan harga yang diterima konsumen akhir dan *department store*/toko. Komisi yang tertera di *invoice* merupakan keuntungan/margin yang diberikan kepada *Department Store*/toko. Hal ini diperkuat oleh contoh perhitungan diskon yang diperoleh oleh *Department Store*/Toko sebagaimana menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam *agreement* kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store*/Toko, dimana pengurang harga yang diperoleh merupakan keuntungan/margin bagi *department store*/toko, walaupun dalam *invoice* tertulis kata komisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Invoice kepada PT Benua Hamparan Luas Nomor LC07-000743 tanggal 30 September 2007, disebutkan data sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp.)
Penjualan <i>Lee Cooper</i> Periode 1 sd 30 Sept 2007	14.662.950,00
Diskon 0 %	0,00
	14.662.950,00
Komisi 31,50 %	4.618.860,00
Penjualan Bersih	10.044.152,00
Penjualan <i>Lee Cooper Sale</i> 0 %	10.899.400,00
Diskon 0 %	74.850,00
	10.824.550,00
Komisi 23.00 % (<i>Sureprice Gift</i> Rp 450.000)	2.489.647,00
Penjualan Bersih	8.334.904,00
Penjualan <i>Lee Cooper Sale</i> 10 %	718.500,00
Diskon 10 %	71.850,00
	646.650,00
Komisi 31,50 %	203.694,00
Penjualan Bersih	442.956,00
Penjualan <i>Lee Cooper Sale</i> 30 %	4.130.000,00
Diskon 30 %	1.239.000,00
	2.891.000,00
Komisi 31,50 %	910.670,00
Penjualan Bersih	1.980.330,00
Penjualan <i>Lee Cooper Sale</i> 50 %	11.603.500,00
Diskon 50 %	5.801.750,00
	5.801.750,00
Komisi 23.00 %	1.334.429,00
Penjualan Bersih	4.467.374,00
Total Penjualan Bersih	25.269.716,00

Dari sampel *invoice* diatas, dapat secara jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan makna dan maksud yang jelas, dimana diskon dimaksudkan sebagai potongan harga yang dinikmati oleh konsumen akhir, sedangkan komisi merupakan istilah yang digunakan untuk keuntungan/margin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada *Department Store*/toko terkait dengan penetapan harga jual kepada konsumen akhir yang harus seragam untuk seluruh *department store*/toko yang menjual produk perusahaan. “Komisi” atau keuntungan/margin bagi *department store*/toko dihitung dari harga setelah “diskon” yang diberikan kepada konsumen akhir. Perlakuan ini juga sejalan dengan *agreement* yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store*/Toko dimana Pemohon Peninjauan Kembali harus tidak boleh lebih mahal dibandingkan harga jual di *Department Store*/toko lainnya. Penggunaan istilah komisi dalam *invoice* hanya untuk membedakan antara potongan harga yang diterima konsumen akhir dan *department store*/toko. Komisi yang tertera di *invoice* merupakan keuntungan/margin yang diberikan kepada *Department Store*/toko. Hal ini diperkuat oleh contoh perhitungan diskon yang diperoleh oleh *Department Store*/Toko sebagaimana menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam *agreement* kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store*/Toko, dimana pengurang harga yang diperoleh merupakan keuntungan/margin bagi *department store*/toko, walaupun dalam *invoice* tertulis kata komisi.

5. *Invoice* kepada PT Panen Lestari Internusa Nomor LC07-000449 tanggal 30 Juni 2007, disebutkan data sebagai berikut:

Keterangan

	Jumlah (Rp.)
Penjualan <i>Lee Cooper</i> Periode 1 s.d 30 Juni 2007	26.344.000,00
Diskon 0 %	0,00
	26.344.000,00
Komisi 31,50 %	8.298.416,00
Penjualan Bersih	18.045.696,00
Penjualan <i>Lee Cooper Sale</i> 10 %	808.000,00
Diskon 10 %	80.800,00
	727.200,00
Komisi 31.50 %	229.067,00
Penjualan Bersih	498.133,00
Total Penjualan Bersih	18.543.829,00



Dari sampel *invoice* diatas, dapat secara jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan makna dan maksud yang jelas, dimana diskon dimaksudkan sebagai potongan harga yang dinikmati oleh konsumen akhir, sedangkan komisi merupakan istilah yang digunakan untuk keuntungan/margin yang diberikan kepada *department store*/toko terkait dengan penetapan harga jual kepada konsumen akhir yang harus seragam untuk seluruh *department store*/toko yang menjual produk perusahaan. “Komisi” atau keuntungan/margin bagi *department store*/toko dihitung dari harga setelah “diskon” yang diberikan kepada konsumen akhir. Perlakuan ini juga sejalan dengan *agreement* yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store/Toko* dimana Pemohon Peninjauan Kembali harus tidak boleh lebih mahal dibandingkan harga jual di *Department Store*/toko lainnya. Penggunaan istilah komisi dalam *invoice* hanya untuk membedakan antara potongan harga yang diterima konsumen akhir dan *department store*/toko. Komisi yang tertera di *invoice* merupakan keuntungan/margin yang diberikan kepada *Department Store*/toko. Hal ini diperkuat oleh contoh perhitungan diskon yang diperoleh oleh *Department Store*/Toko sebagaimana menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam *agreement* kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Department Store*/Toko, dimana pengurang harga yang diperoleh merupakan keuntungan/margin bagi *department store*/toko, walaupun dalam *invoice* tertulis kata komisi.

Dari kelima sampel tersebut diatas, dapat terlihat bahwa besarnya “komisi” yang seharusnya dibaca sebagai keuntungan/margin *department store*/toko, yang besarnya berbeda-beda untuk setiap *department store*/tokonya tergantung kepada kesepakatan antara PT *Lee Cooper* Indonesia dengan *department store*/toko.

k. Dalam pengajuan peninjauan kembali ini, kami menyampaikan data surat keterangan dari:

- 1) Surat Keterangan dari PT Benua Hambaran Luas Nomor 108/BHL/FIN/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa pertama, harga yang tertera dalam label harga yang dibuat oleh PT Lee Cooper Indonesia merupakan harga jual perusahaan kami kepada konsumen dan kami sudah membayar PPN-nya. Kedua, margin penjualan pada *invoice* PT Lee Cooper Indonesia merupakan diskon/potongan harga yang diberikan oleh PT Lee



Cooper Indonesia kepada perusahaan kami, sehingga bukan objek PPh Pasal 23. Ketiga, harga setelah dikurangi diskon ke customer dan margin merupakan harga beli (harga pokok) perusahaan kami. Keempat, perusahaan kami hanya mendapatkan diskon dari *invoice* PT Lee Cooper Indonesia.

2. Surat Keterangan dari PT Panen Lestari Internusa Nomor 27/11/PLI-TAX/2011 tanggal 1 November 2011 yang menyatakan bahwa pertama, sehubungan dengan transaksi antara PT Panen Lestari Internusa dengan PT Lee Cooper Indonesia bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008, bahwasanya harga yang tertera dalam label harga yang dibuat PT Lee Cooper Indonesia merupakan harga jual perusahaan kami kepada konsumen dan kami sudah membayar PPN-nya. Kedua, komisi/margin penjualan pada *invoice* PT Lee Cooper Indonesia merupakan diskon/potongan harga yang diberikan oleh PT Lee Cooper Indonesia kepada perusahaan kami, sehingga bukan objek PPh Pasal 23. Ketiga, harga setelah dikurangi diskon ke customer dan komisi/margin merupakan harga beli (harga pokok) perusahaan kami. Dan keempat, perusahaan kami tidak membukukan atau mengakui pendapatan komisi yang tercantum di *invoice* PT Lee Cooper Indonesia.
- 3) Surat Keterangan dari PT Matahari *Department Store*, Tbk Nomor MDS-013/MDS/Tax/X/2011, yang menyatakan bahwa pertama, harga yang tertera dalam label harga yang dibuat PT Lee Cooper Indonesia merupakan harga jual perusahaan kami kepada konsumen dan kami sudah membayar PPN-nya. Kedua, komisi/margin penjualan pada *invoice* PT Lee Cooper Indonesia merupakan diskon/potongan harga yang diberikan oleh PT Lee Cooper Indonesia kepada perusahaan kami, sehingga bukan objek PPh Pasal 23. Ketiga, harga setelah dikurangi diskon ke customer dan komisi/margin merupakan harga beli (harga pokok) perusahaan kami. Dan keempat, perusahaan kami tidak membukukan atau mengakui pendapatan komisi yang tercantum di *invoice* PT Lee Cooper Indonesia.

Dari ketiga sampel surat keterangan dari *Department Store*/Toko tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat komisi yang Pemohon Peninjauan Kembali berikan kepada *Department Store*/Toko tetapi kami memberikan potongan harga/diskon penjualan yang merupakan keuntungan/margin yang dinikmati *Departement Store*/Toko sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, kami menyertakan perjanjian kerjasama antara PT Lee Cooper Indonesia dengan *department store*/toko sebagai berikut:

1 Perjanjian Pemasokan Barang dengan PT Metropolitan Retailment Nomor Ref. No 3252, dalam perjanjian ini diatur beberapa istilah antara lain:

- Tingkat Diskon Pasokan, yaitu prosentase penjualan kotor yang menjadi bagian METRO (PT Metropolitan Retailment);
- Diskon Pasokan, yaitu bagian yang diterima METRO (PT Metropolitan Retailment) setiap bulan dihitung berdasarkan tingkat diskon pasokan dikalikan dengan penjualan kotor bulan itu;
- Diskon Pasokan Minimum, yaitu jumlah minimum diskon pasokan yang harus diterima METRO (PT Metropolitan Retailment) setiap periode yang ditentukan

Dalam lampiran A angka 6 Perjanjian Pemasokan Barang diatur besarnya diskon pasokan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini secara tegas menyatakan bahwa bagian dari PT Metropolitan Retailment merupakan diskon pasokan dan bukan komisi, walaupun dalam *invoice* yang dibuat oleh PT Lee Cooper Indonesia tertera kata komisi, hal ini hanya untuk membedakan dengan kata diskon yang khusus diberikan kepada konsumen akhir.

2 Perjanjian Kerjasama Perdagangan sementara dengan PT Panen Lestari Internusa (SOGO) Nomor 029/MWIT/HKM/06 dalam pasal 6 mengenai Target Penjualan dan Pendapatan diatur mengenai jumlah penjualan minimum yang harus dicapai oleh produk PT Lee Cooper Indonesia, dan ditetapkan besarnya *profit margin* yang akan diterima oleh PT Panen Lestari Internusa sebagai bagian dari kerjasama ini.

Perjanjian ini secara tegas menyatakan bahwa bagian dari PT Panen Lestari Internusa merupakan profit margin dan bukan komisi, walaupun dalam *invoice* yang dibuat oleh PT Lee Cooper Indonesia tertera kata komisi, hal ini hanya untuk membedakan dengan kata diskon yang khusus diberikan kepada konsumen akhir.

Halaman 17 dari 45 halaman. Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karena sifat dari “komisi” yang tertera dalam *invoice* secara substansi merupakan keuntungan/margin bagi *Departement Store/Toko*, maka kami mengakui besarnya penjualan adalah sebesar harga jual neto kepada *Departement Store/Toko*. Hal ini terkait dengan strategi pemasaran yang kami lakukan agar produk kami dapat bersaing dengan kompetitor dan harga jual kepada konsumen akhir dapat terkontrol.

Pembukuan kami mencatat nilai penjualan dalam buku besar dengan harga neto dan bukan dengan harga bruto dan tidak adanya biaya komisi dalam akun biaya usaha kami untuk tahun buku 2007 dan 2008. Pembukuan kami juga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen. Laporan Keuangan tahun 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen, menyatakan bahwa laporan keuangan kami disajikan secara wajar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

Dengan diperolehnya pendapat wajar atas pembukuan kami, maka menurut kami pencatatan dan pengakuan besarnya nilai penjualan yang kami catat dalam jumlah neto telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- m. Harga jual produk *Lee Cooper* kepada konsumen akhir ditetapkan dalam harga yang seragam diantara seluruh *department store/toko* yang ada. Hal ini merupakan strategi pemasaran untuk mengontrol harga jual kepada konsumen akhir dengan harapan dapat bersaing dengan produk kompetitor. Dengan strategi pemasaran seperti ini maka kontrol atas harga jual kepada konsumen akhir berada di Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini berbeda dengan metode pemasaran yang lazim dilakukan yaitu menetapkan harga jual tertentu kepada *department store/toko* dan memberikan hak kepada *Department Store/toko* untuk menentukan harga jual produk kepada konsumen akhir. Pemohon Peninjauan Kembali memilih strategi pertama karena untuk menjaga harga produk dibandingkan dengan produk kompetitor yang kemungkinan akan rusak atau akan mengakibatkan pemasaran yang tidak fair diantara *department store/toko* yang menjadi mitra perusahaan.

Dengan pemilihan strategi tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan memberikan suatu keuntungan/margin tertentu kepada *Department Store/toko* sesuai dengan negosiasi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *department*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



store/toko. Margin bagi department store/toko tersebut langsung kami akui sebagai pengurang harga jual karena margin tersebut merupakan hak *department store/toko* yang akan mengakuinya sebagai pengurang harga pembelian.

Disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim yang tidak mengabulkan permohonan kami untuk membatalkan koreksi negatif biaya usaha terkait dengan keuntungan/margin bagi department store/toko yang oleh pemeriksa pajak diperlakukan sebagai biaya komisi tahun 2007 sebesar Rp12.540.052.452,00, dengan alasan bahwa:

a Terdapat ketidakkonsistenan Majelis Hakim.

Halaman 5 angka 2.

“2. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp12.545.187.404,00”.

Bahwa alasan koreksi pemeriksa angka 2 adalah koreksi negative harga pokok penjualan sebesar Rp12.545.187.404,00 dan bukan koreksi negatif biaya usaha sebagaimana disebutkan dalam putusan Majelis Hakim. Dari kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dalam memutuskan perkara, dimana pada bagian awal putusan pengadilan pajak dikatakan bahwa koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp12.545.187.404,00 dan bukan koreksi negatif biaya usaha sebagaimana disebutkan dalam putusan Majelis Hakim. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam memutus perkara yang disengketakan sehingga seharusnya putusan ini batal demi hukum.

b Ketidakadilan Majelis Hakim Yang Tidak Mempertimbangan Substansi Sengketa Pajak.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk membatalkan koreksi Terbanding. Kami telah menyerahkan sampel dokumen pendukung pada saat pemeriksaan, keberatan, dan kami juga menghadiri sidang beberapa kali. Ketidakhadiran kami pada sidang-sidang banding bukanlah merupakan suatu keadaan yang menyebabkan Majelis Hakim tidak berkenan untuk mempertimbangkan substansi masalah yang terjadi. Kondisi inilah yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali memberikan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan ketidakhadiran kami dalam persidangan, kami menyadari terdapat kelalaian yang dilakukan oleh konsultan kami, dan atas kelalaian ini kami akan mengajukan tuntutan kepada mereka. Mohon kiranya kondisi ini dapat dipertimbangkan sehingga seharusnya Majelis Hakim tidak hanya melihat ketidakhadiran sebagai sesuatu yang menutup segala pintu untuk mencari keadilan dan kebenaran material atas pokok sengketa pajak tersebut diatas.

Dengan ketidaksetujuan kami atas koreksi positif peredaran usaha sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah koreksi negative biaya usaha terkait dengan keuntungan/margin bagi *department store*/toko yang oleh pemeriksa pajak diperlakukan sebagai biaya komisi tahun 2007 sebesar Rp12.540.052.452,00 juga tidak setuju dan koreksi tersebut harus dibatalkan demi keadilan dan kepastian hukum.

Adapun alasan lebih terperinci telah kami uraikan panjang lebar dalam memori peninjauan kembali yang dapat dilihat dan dibaca pada poin 2.b. ketidakadilan majelis hakim yang tidak mempertimbangan substansi sengketa pajak

- c Majelis Hakim tidak memperhatikan putusan pengadilan pajak yang substansi transaksinya sama dengan yang dihadapi oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Adapun putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terdahulu yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa pajak yang kami hadapi dapat dilihat dalam memori peninjauan kembali poin 2.c yang juga sebagai bagian dari memori peninjauan kembali atas koreksi positif peredaran usaha tahun 2007 sebesar Rp12.540.052.452,00 yang telah kami uraikan diatas.

- 2.c. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Putusan Pengadilan Pajak Terdahulu.

Putusan Majelis Hakim mengenai pokok sengketa pajak sebagaimana diuraikan diatas, berbeda dengan putusan pengadilan pajak terdahulu dengan ringkasan sebagai berikut:

- 2.c.1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-11369/PP/M.I/16/2007.

Pemohon Banding : PT ABC Garment Industries

Jenis Pajak : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Pertambahan Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak : 2003

Pokok Sengketa : Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN

Menurut Majelis bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Pemohon Banding dan Wakil Terbanding dalam persidangan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Terbanding beranggapan bahwa perpindahan barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding dari pabrik ke *Sales Promotion Girl* di *Departement Store* dikategorikan sebagai penyerahan BKP secara konsinyasi, oleh karena itu atas perpindahan barang dimaksud terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena perpindahan barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan penyerahan konsinyasi melainkan antar cabang;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap dokumen yang diserahkan Pemohon Banding diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa judul perjanjian yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan pihak *Departement Store* adalah perjanjian konsinyasi;

Bahwa definisi konsinyasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijual dengan pembayaran kemudian - jual titip;

Bahwa Pemohon Banding melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya PT GHI Tbk. Dan PT DEF untuk menjual produk yang dihasilkan Pemohon Banding;

Bahwa dalam perjanjian tersebut, pihak PT GHI Tbk. Dan PT DEF (*DEF Departement Store*) menyediakan tempat/*counter* bagi Pemohon Banding untuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Banding akan memberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzet penjualan kepada pihak yang menyediakan tempat;

Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut dan membayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilangan barang di *counter* dan atau terjadi *force majeure* menjadi beban dan tanggung jawab Pemohon Banding;

Halaman 21 dari 45 halaman. Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan arus barang sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon Banding, pengiriman stok dari gudang Pemohon Banding dilakukan ke *Counter Sales Promotion Girl* Pemohon Banding di *DEF Departement Store*;

Bahwa bila terjadi transaksi penjualan, *Sales Promotion Girl* akan membuat bon penjualan (rangkap 3) yang berisi artikel, jumlah stok, harga, potongan (jika ada) dan jumlah yang harus dibayar konsumen;

Bahwa bon penjualan berwarna putih akan diserahkan kepada konsumen untuk membayar ke kasir, bon penjualan warna merah akan disatukan dengan produk yang dibeli, dan warna kuning akan *difile* oleh *Sales Promotion Girl* untuk dikirimkan kepada *Finance & Accounting* Pemohon Banding;

Bahwa setelah barang dibayar oleh konsumen, *Sales Promotion Girl* akan mengambil bon penjualan warna putih yang telah divalidasi oleh kasir untuk dicatat dalam Laporan Penjualan Harian *Counter*, kemudian bon akan dikembalikan lagi ke kasir, sedangkan konsumen menerima barang disertai bon penjualan warna merah dan faktur pajak sederhana;

Bahwa berdasarkan rekapitulasi, laporan dan pencatatan penjualan di *counter*, *Finance & Accounting* Pemohon Banding melakukan penagihan ke *DEF Departementt Store* yang jumlahnya sebesar penjualan dikurangi dengan diskon acara (bila ada) dan margin toko sebagaimana disepakati Pemohon Banding dan *DEF Department Store*;

Bahwa berdasarkan Nota Perhitungan Tagihan tersebut Pemohon Banding akan menerbitkan Faktur pajak Standar untuk *DEF Departement Store*;

Bahwa secara periodik Pemohon Banding akan menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata bahwa meskipun judul perjanjian antara Pemohon Banding dengan *Departement Store* adalah Perjanjian Konsinyasi, namun substansi dari perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian konsinyasi, melainkan penyerahan antar cabang;

Bahwa dalam Pasal IA ayat (1) huruf g tersebut di atas antara lain dijelaskan bahwa "Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut...”;

Bahwa karena perpindahan barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan penyerahan konsinyasi, maka atas perpindahan barang tersebut bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data/ okumen dalam berkas banding, keterangan Kuasa Hukum Pemohon Banding dan Wakil Terbanding dalam persidangan serta uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan yang meyakinkan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp10.198.210.740,00, sehingga koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan;

2.c.2. Putusan Pengadilan pajak Nomor Put-09374/PP/M.IV/16/2006.

Pemohon Banding : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : Koreksi Positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2004.

Menurut Majelis bahwa menurut Pemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 adalah sebesar Rp 0,00;

Bahwa Terbanding dalam Keputusan Nomor LAP07/WPJ.11/KP.0509/2005 tanggal 19 Oktober 2005 menetapkan besarnya Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp124.226.503,00, sehingga terdapat koreksi sebesar Rp124.226.503,00;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP07/WPJ.11/KP.0507/2005 tanggal 2 Agustus 2005 diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp124.226.503,00



berdasarkan Alat Keterangan Nomor AK.0 I/WPJ.II/KP.0506/2005 tanggal 4 Maret 2005 dimana diketahui terdapat penjualan yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding untuk tahun 2004 dimana Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan sebesar 17,5% dari omzet penjualan (yang dianggap sebagai diskon) oleh Pemohon Banding belum dilaporkan di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak benar karena berdasarkan perjanjian kerjasama perdagangan antara Pemohon Banding dengan pihak DEF disebutkan bahwa pihak DEF memberikan diskon penjualan sebesar 17,5% dari total penjualan termasuk pajak Pertambahan Nilai (yang dianggap oleh Terbanding sebagai biaya sewa);

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti pendukung berupa fotokopi:

- 1 Perjanjian Kerjasama Perdagangan Nomor 006/SPM/ P?HKM/2003 tanggal 1 Agustus 2003 dan lampiran;
- 2 Tanda terima pembayaran;
- 3 Rekapitulasi Penjualan;
- 4 Faktur Pajak Sederhana;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti berupa Perjanjian Kerjasama Perdagangan antara Pihak Pertama (DEF) dengan Pihak Kedua (*Supplier*, dalam hal ini Pemohon Banding), diketahui bahwa secara formal perjanjian tersebut tidak menyebutkan istilah “Sewa” sebagaimana dimaksud oleh Terbanding;

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Perdagangan antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1. Definisi

2. *Supplier* adalah pelaku usaha yang merupakan distributor langsung atau agen tunggal atas suatu barang tertentu yang memiliki keaslian yang menjual barangnya du DEF bedasarkan ketentuan yang ditetapkan DEF;

6. Area Perdagangan adalah suatu area/ ruangan yang dikuasai dan berada di dalam DEF termasuk area penjualan atrium, koridor dan



promosi yang digunakan *Supplier* untuk menjual Barang-Barang Dagangan;

Pasal 3. Area Perdagangan

2. DEF berkewajiban untuk menyediakan dan menentukan Area Perdagangan dengan sarana sesuai standar DEF. Segala perubahan terhadap sarana harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DEF.

5. DEF berhak dan berwenang penuh untuk mengubah dan/atau memindahkan luas/Area Perdagangan sesuai kebutuhan DEF. Dengan pemberitahuana secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan perubahan/pemindahan tersebut.

6. Atas perubahan/pemindahan tersebut, DEF tidak perlu memberikan alasan apapun dan kepada siapapun juga karenanya *Supplier* dan/atau wakilnya/kuasanya atau karyawannya tidak berhak mengajukan keberatan/tuntutan berupa apapun juga atas perubahan/pemindahan tersebut;

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon Banding selaku *Supplier* adalah pelaku usaha yang merupakan distributor langsung atau agen tunggal yang menjual barangnya di DEF berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DEF;

Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut perjanjian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memiliki hak penuh penguasaan atas Area Perdagangan di dalam DEF, sehingga dalam hal ini tidak terjadi sewa menyewa antara Pemohon Banding dengan DEF sebagaimana pendapat Terbanding;

Bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan kepada DEF yang selanjutnya melakukan penjualan kepada konsumen melalui *counter*;

Bahwa atas penjualan oleh Pemohon Banding tersebut kepada DEF telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan dibuat Faktur Pajak Standar;

Bahwa Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

“Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan



barang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini, potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak... dst”;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Faktur Pajak, diketahui bahwa Pemohon Banding telah mencantumkan diskon (potongan harga) sebagai pengurang penjualan;

Bahwa sesuai dengan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa diskon (potongan harga) yang tercantum dalam Faktur Pajak dapat mengurangi harga jual;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding terhadap rekapitulasi penjualan bulanan, Terbanding menyimpulkan adanya dua kali diskon yang diberikan Pemohon Banding yaitu kepada konsumen dan juga kepada pihak DEF;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap mekanisme penjualan, diketahui bahwa apabila dilihat dari arus uang, maka konsumen dalam melakukan pembelian membayar langsung kepada kasir DEF dan DEF yang mengeluarkan struk pembelian;

Bahwa dengan demikian, apabila dalam penjualannya DEF memberikan diskon kepada konsumen, menurut pendapat Majelis adalah bukan termasuk dalam pengertian diskon yang diberikan oleh Pemohon Banding dan karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memberikan dua kali diskon sebagaimana pendapat Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp124.226.503,00 tidak dapat dipertahankan;

2.c.3. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-09375/PP/M.IV/16/2006.

Pemohon Banding : PT ABC
Jenis Pajak : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s/d
Desember
Tahun Pajak : 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Sengketa : Koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003.

Menurut Majelis bahwa menurut Pemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 adalah sebesar Rp 0,00;

Bahwa Terbanding dalam Keputusan Nomor KEP-40/WPJ.11/KP.0509/2005 tanggal 19 Oktober 2005 menetapkan besarnya Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp74.782.550,00, sehingga terdapat koreksi sebesar Rp74.782.550,00;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-06/WPJ.11/KP.0507/2005 tanggal 2 Agustus 2005 diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp74.782.550,00 berdasarkan Alat Keterangan Nomor AK.0 I/WPJ.II/KP.0506/2005 tanggal 4 Maret 2005 dimana diketahui terdapat penjualan yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding untuk tahun 2003 dimana Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan sebesar 17,5% dari omzet penjualan (yang dianggap sebagai diskon) oleh Pemohon Banding belum dilaporkan di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak benar karena berdasarkan perjanjian kerjasama perdagangan antara Pemohon Banding dengan pihak DEF disebutkan bahwa pihak DEF memberikan diskon penjualan sebesar 17,5% dari total penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (yang dianggap oleh Terbanding sebagai biaya sewa);

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti berupa Perjanjian Kerjasama Perdagangan antara Pihak Pertama (DEF) dengan Pihak Kedua (*Supplier*, dalam hal ini Pemohon Banding), diketahui bahwa secara formal perjanjian tersebut tidak menyebutkan istilah "Sewa" sebagaimana dimaksud oleh Terbanding;

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Perdagangan antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 27 dari 45 halaman. Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1. Definisi

2. *Supplier* adalah pelaku usaha yang merupakan distributor langsung atau agen tunggal atas suatu barang tertentu yang memiliki keaslian yang menjual barangnya di DEF berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DEF;

6. Area Perdagangan adalah suatu area/ ruangan yang dikuasai dan berada di dalam DEF termasuk area penjualan atrium, koridor dan promosi yang digunakan *Supplier* untuk menjual Barang-Barang Dagangan;

Pasal 3. Area Perdagangan

2. DEF berkewajiban untuk menyediakan dan menentukan Area Perdagangan dengan sarana sesuai standar DEF. Segala perubahan terhadap sarana harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DEF.

1. DEF berhak dan berwenang penuh untuk mengubah dan/atau memindahkan luas/Area Perdagangan sesuai kebutuhan DEF. Dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan perubahan/pemindahan tersebut.

2. Atas perubahan/pemindahan tersebut, DEF tidak perlu memberikan alasan apapun dan kepada siapapun juga karenanya *Supplier* dan/atau wakilnya/kuasanya atau karyawannya tidak berhak mengajukan keberatan/tuntutan berupa apapun juga atas perubahan/pemindahan tersebut;

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon Banding selaku *Supplier* adalah pelaku usaha yang merupakan distributor langsung atau agen tunggal yang menjual barangnya di DEF berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DEF;

Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut perjanjian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memiliki hak penuh penguasaan atas Area Perdagangan di dalam DEF, sehingga dalam hal ini tidak terjadi sewa menyewa antara Pemohon Banding dengan DEF sebagaimana pendapat Terbanding;

Bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan kepada DEF yang selanjutnya melakukan penjualan kepada konsumen melalui *counter*;



Bahwa atas penjualan oleh Pemohon Banding tersebut kepada DEF telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan dibuat Faktur Pajak Standar;

Bahwa Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

“Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini, potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak... dst”;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Faktur Pajak, diketahui bahwa Pemohon Banding telah mencantumkan diskon (potongan harga) sebagai pengurang penjualan;

Bahwa sesuai dengan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa diskon (potongan harga) yang tercantum dalam Faktur Pajak dapat mengurangi harga jual;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding terhadap rekapitulasi penjualan bulanan, Terbanding menyimpulkan adanya dua kali diskon yang diberikan Pemohon Banding yaitu kepada konsumen dan juga kepada pihak DEF;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap mekanisme penjualan, diketahui bahwa apabila dilihat dari arus uang, maka konsumen dalam melakukan pembelian membayar langsung kepada kasir DEF dan DEF yang mengeluarkan struk pembelian;

Bahwa dengan demikian, apabila dalam penjualannya DEF memberikan diskon kepada konsumen, menurut pendapat Majelis adalah bukan termasuk dalam pengertian diskon yang diberikan oleh Pemohon Banding dan karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memberikan dua kali diskon sebagaimana pendapat Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp74.782.550,00 tidak dapat dipertahankan;

2.c.4. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-08440/PP/M.XI/16/2006.

Pemohon Banding : PT ABC Cabang Yogyakarta

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Tahun Pajak : 2002

Pokok Sengketa : 1. Koreksi positif penjualan produk PT DEF Indonesia Tbk. sebesar Rp14.159.426.880,00
2. Koreksi Positif penjualan produk Seiko/Alba sebesar Rp4.726.059.258,00

1. Koreksi Positif penjualan produk PT DEF Indonesia sebesar Rp14.159.426.880

Menurut Majelis bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang ada dalam berkas banding diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp14.159.426.880,00 karena Pemohon Banding tidak melaporkan penjualan produk PT DEF Indonesia Tbk. dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002.

Bahwa menurut Pemohon Banding penjualan produk PT DEF Indonesia Tbk. sebesar Rp14.159.426.880,00 tersebut adalah penjualan Kantor Pusat Jakarta langsung kepada konsumen di Yogyakarta.

Bahwa atas penjualan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Kantor Pusat Jakarta.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut, diketahui bahwa Kantor Pusat Pemohon Banding melakukan penjualan produk PT DEF Indonesia Tbk. sebesar Rp14.159.426.880,00 langsung ke konsumen di Yogyakarta, dicatat sebagai penjualan Kantor Pusat Jakarta dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Kantor Pusat Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap penjualan cabang-cabang lain seluruh Indonesia, diketahui bahwa *invoice* atas penjualan Kantor Pusat Jakarta dibuat atas nama masing-masing cabang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang, Majelis berpendapat bahwa penjualan produk PT DEF Indonesia Tbk. sebesar Rp14.159.426.880 tersebut telah disetor dan dilaporkan Pajak Pertambahan Nilainya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Kantor Pusat Jakarta melalui Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tambora dengan menggunakan Faktur Pajak Sederhana.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif penjualan produk PT DEF Indonesia Tbk. sebesar Rp14.159.426.880,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Positif penjualan produk Seiko/Alba sebesar Rp4.726.059.258,00

Menurut Majelis: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen dalam berkas banding diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp4.726.059.258 karena Pemohon Banding tidak melaporkan penjualan produk Seiko/Alba tersebut dalam Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002.

Bahwa dalam sidang Pemohon Banding mengakui bahwa penyerahan barang titipan/konsinyasi belum dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan-penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis berpendapat bahwa penyerahan barang Seiko/Alba sebesar Rp4.726.059.258 yang dititipkan oleh Sdr. MNO merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai dan harus dipungut Pajak Pertambahan Nilainya oleh Pemohon Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif penjualan produk GHI/JKL sebesar Rp4.726.059.258,00 sudah benar sehingga tetap dipertahankan.

2.c.5. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.00211/BPSP/M.II// 12/1998.

Pemohon Banding : CV ABC
Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak : 1991
Pokok Sengketa : Koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp630.452.417,00

Pendapat Majelis sesuai hasil persidangan tanggal 28 September 1998, Majelis meminta agar Pemohon menyampaikan:

- Surat perjanjian antara Pemohon dengan *Retailer (outlet-outlet)*,
- Bukti tagihan dan atau perhitungan barang yang laku terjual dan komisi yang dibayarkan/dipotong.

Pemohon hanya dapat menyampaikan sebagian bukti yang diminta Majelis karena pada tanggal 14 Mei 1998 telah terjadi kerusuhan di Solo yang mengakibatkan gedung/toko milik Pemohon di Jalan Yos Sudarso No. XX Solo terbakar, termasuk arsip-arsip yang ada.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon maka Majelis berkesimpulan bahwa jumlah uang yang diterima Pemilik Gedung besarnya tidak tetap, tergantung pada ada tidaknya barang-barang dagangan milik Pemohon yang terjual, bukan tergantung pada dipakai atau tidaknya ruangan.

Pembayaran dari pembeli melalui Pemilik Gedung dan pembagian keuntungan untuk Pemilik Gedung sebesar 25% dari barang-barang yang terjual akan dipotong langsung setiap kali realisasi pembayaran dari Pemilik Gedung kepada Pemohon.

Masalah Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pungutan di muka yang akhirnya harus diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Bada Pemilik Gedung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan penelitian bukti-bukti/dokumen-dokumen yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Terbanding, pemeriksaan dan keterangan lisan dari Terbanding dalam Persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap pemakaian ruangan di DEF Jakarta dan GHI Jakarta.

Berdasarkan penelitian bukti-bukti/dokumen-dokumen yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Terbanding, pemeriksaan dan keterangan lisa dari Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon atas pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap pemakaian ruangan di JKL Super Market Jakarta sehingga koreksi Pemeriksa tetap dipertahankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-084/WPJ.08/ BD.0302/1996 tanggal 15 Agustus 1996 mengenai Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1991 No. 00000.000.00.000.00 tanggal 20 November 1995 tidak sepenuhnya dapat dipertahankan.

2.c.6. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-09991/PP/M.III/ 12/2007.

Pemohon Banding : PT Batik ABC
Jenis Pajak : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak : 2002
Pokok Sengketa : Koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa komisi kepada pedagang perantara.

Menurut Majelis bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang dilampirkan Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PEM-221/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPI.04/RP.02.00/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tiga diperoleh petunjuk bahwa Terbanding melakukan koreksi positif objek Pajak Penghasilan 23 sebesar Rp86.703.341,00;

Bahwa alasan koreksi positif terbanding adalah jumlah sebesar Rp86.703.341,00 bukan merupakan biaya sewa ruangan melainkan komisi kepada perantara dalam hal ini adalah PT DEF (berdasarkan surat perjanjian antara kedua belah pihak);

Bahwa Pejabat yang mewakili Terbanding tidak pernah hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan secara berturut-turut tanpa memberikan penjelasan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dikirimkan tiga kali panggilan tertulis sebagai berikut:

- 1 No. Pang-022/SP/Pg.05/2006 tanggal 15 September 2006 untuk persidangan tanggal 25 September 2006;
- 2 No. Pang-032/SP/Pg.05/2006 tanggal 27 September 2006 untuk persidangan tanggal 16 September 2006;
- 3 No. Pang-041/SP/Pg.05/2006 tanggal 6 November 2006 untuk persidangan tanggal 13 November 2006;

Bahwa dengan demikian tidak dapat diperoleh penjelasan lebih lanjut dari Terbanding mengenai koreksi yang dilakukan;

Bahwa Kuasa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Terbanding dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan komisi adalah diskon (bagi hasil) sebesar persentase dari omset bruto yang dipotong langsung oleh PT DEF, atas barang-barang yang terjual milik Pemohon Banding di counter JKL Fatmawati milik PT EF berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disetujui bersama;

Bahwa lebih lanjut Kuasa Pemohon banding mengemukakan bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan pembayaran yang berupa komisi kepada PT DEF, sehingga Pemohon banding tidak dapat memotong atas objek yang dimaksud Terbanding, tetapi sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding menerima pembayaran setiap bulan sekali atas barang-barang yang sebagai penjualan Pemohon banding kepada PT DEF;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon Banding menyerahkan kepada Majelis fotokopi dokumen sebagai berikut:

1. Perjanjian Ikatan Jual Beli tertanggal 7 Agustus 2002, yang telah dilegalisir oleh MNO, S.H, Notaris-PPAT di Surakarta;
2. Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 8 tanggal 31 Desember 2002 yang dibuat oleh MNO, S.H, Notaris-PPAT di Surakarta;
3. Perjanjian kerjasama Menggunakan Sebagian Tanah dan Bangunan di GHI Fatmawati dengan sistem bagi hasil antara PT batik ABC dengan PT DEF, Nomor 004/PBH/D'BEST-FAT/VIII/02 tanggal 1 Agustus 2002;
4. SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2001;
5. Faktur Pajak Standar Nomor Seri: CMWEB.016.0000027 tanggal 31 Desember 2002 yang diterbitkan oleh PT Batik ABC;
6. Rekapitulasi Penjualan Bulan Desember 2002 PT DEF (PQR Fatmawati);
7. Perjanjian Kerjasama Nomor 081/VII/CSG/NBD/02 tanggal 31 Juli 2002 antara Pemohon Banding dengan PT STU;
8. Surat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Denpasar Nomor Pemb-1788/WPJ.17/RP01/2005 tanggal 23 September 2005, hal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2002, yang ditujukan kepada PT Batik ABC Cabang Galeri kawasan Nusa Dua Kuta Denpasar;
9. Surat Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Dua Nomor Pemb-109/WPJ.07/RP.0200.5/2004 tanggal 28 April 2004, hal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2002, yang ditujukan kepada PT Batik ABC Cabang Bandung;
10. Surat Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Dua Nomor Pemb-70/WPJ.05/RP.03/A.2.01/2004 tanggal 15

Halaman 35 dari 45 halaman. Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2004, hal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2002, yang ditujukan kepada PT Batik ABC Cabang VWX Plaza XYZ;

Bahwa berdsarkan keterangan Kuasa Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding mulai beroperasi atau aktif sejak bulan Agustus 2002, dimana sebelumnya adalah PT Batik ABC Utama sebagai anak perusahaan PT Batik ABC, yang bergerak di bidang retail, karena alasan manajemen, amaka seluruh persediaan barang PT Batik Utama terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2002 dijual kepada PT batik ABC sesuai dengan perjanjian Ikatan Jual Beli yang dilegalisasi oleh Notaris MNO S.H. tanggal 7 Agustus 2002 dan salinan Akta Jual Beli Nomor 8 tanggal 31 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Notaris MNO, S.H.;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Perjanjian Ikatan Jual Beli tertanggal 7 Agustus 2002, yang telah dilegalisir oleh MNO, S.H., Notaris-PPAT di Surakarta diperoleh petunjuk bahwa PT batik ABC Utama dan PT batik ABC sepakat untuk membuat Ikatan Jual Beli Persediaan Barang Dagangan, dengan nilai keseluruhan atas Ikatan Jual Beli Persediaan Barang Dagangan sebesar Rp22.026.000.000,00 ditambah PPN 10% sehingga berjumlah Rp24.228.600.000,00;

Bahwa bredasarkan pemeriksaan Majelis atas salinan Akta Perjanjian Jual Beli No. 8 tanggal 31 Desember 2002 yang dibuat oleh MNO, S.H., Notaris PPAT di Surakarta, diperoleh petunjuk bahwa PT Batik ABC utama sebgaaai pemilik sah atas asset dan kewajiban per 31 Juli 2002, sepakat untuk menjual asset dan kewajiban yang dimilikinya tersebut kepada PT batik ABC;

Bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa sampai dengan 31 Juli 2002, PT Batik ABC Utama merupakan pemilik sah atas asset dan kewajiba per 31 Juli 2002, sehingga kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari samapai dengan Juli 2002 masih berada pada PT Batik ABC Utama, dan sesuai dengan perjanjian tersebut, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2002, pemilik sah atas asset adalah PT Batik ABC sehingga kewajiban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan SPT Masa Pajak Agustus sampai dengan Desember 2002 berada pada PT batik ABC;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Perjanjian Kerjasama menggunakan sebagian tanah dan bangunan di GHI Fatmawati dengan sistem bagi hasil antara PT Batik ABC dengan PT DEF, Nomor 004/PBH/D'BESTFat/VIII/02 tanggal 1 Agustus 2002, diperoleh petunjuk bahwa PT DEF, berkedudukan hukum di Tangerang, GHI, Cikokol, lantai 3, Jalan M.H. Thamrin, Cikokol-Tangerang, yang telah membuka Kantor Cabang di Jalan RS. Fatmawati No. 15, Cilandak, Jakarta Selatan akan menyediakan tempat bagi Pemohon Banding dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat, antara lain sebagai berikut:

1. PT DEF menyediakan ruang kosong yang terletak di lantai 2 (dua) Dept. Store GHI-Fatmawati, yang batas-batasnya telah diketahui oleh kedua belah pihak;
2. Para pihak sepakat bahwa untuk biaya pemeliharaan (*service charge*) dan pemakain atas ruangan tersebut berdasarkan sistem bagi hasil dengan ketentuan bahwa PT DEF berhak menerima kontribusi bagi hasil dari Pemohon Banding sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omzet penjualan usaha Pemohon Banding setiap bulan selama kerjasama ini berlangsung;
3. Pengelola usaha dilakukan oleh dan ats tanggung jawab Pemohon Banding dan omzet penjualan setiap hari diterima oleh PT DEF;
4. Cara pembayaran, Pemohon Banding setiap akhir bulan wajib mengirimkan kuitansi tagihan kepada PT DEF dan Pemohon Banding akan merealisasikan pembayaran kepada Pemohon Banding (setelah dipotong/dikurangi dengan pembagian hasil usaha untuk PT DEF) secara transfer ke rekening Pemohon Banding paling lambat 2 (dua) minggu kemudian;
5. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan / 2 (dua) tahun, diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas contoh Faktur Pajak yang dibuat Pemohon Banding untuk penjualan yang dilakukannya kepada PT DEF berupa Faktur Pajak standar yang dibuat Pemohon Banding untuk PT DEF beserta rekapitulasi penjualan Pemohon Banding pada counter batik keris di Dept. Store GHI-Fatmawati, SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2002 diperoleh petunjuk bahwa jumlah uang yang ditransfer PT DEF (Dept. Store GHI-Fatmawati) kepada Pemohon Banding adalah sebesar 75 % dari total penjualan;

Bahwa atas penjualan batik tekstil, kerajinan dan pakaian jadi untuk penyerahan pada bulan tersebut, tidak terdapat pembayaran jasa perantara kepada PT DEF;

Bahwa Majelis dalam persidangan melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding berupa kontrak kerjasama yang dimiliki Pemohon Banding dan Hasil Pemeriksaan Pajak yang dilakukan Terbanding pada Tahun Pajak 2002 atas cabang batik Keris lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Perjanjian Kerjasama Nomor 081/VII/CSG/NBD/02 tanggal 31 Juli 2002 antara Pemohon Banding dengan PT STU diperoleh petunjuk bahwa PT Batik ABC menyetujui sesuai dengan usahanya tiap bulan untuk memberikan dalam jumlah tertentu kepada PT STU sebesar 25% net dari total hasil penjualan kotor dan PT Batik ABC yang berstatus sebagai Pengusaha Kena pajak wajib menerbitkan faktur pajak kepada PT STU tiap-tiap bulan selama jangka waktu perjanjian;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Dua Nomor Pemb-1788/WPJ.17/RP.01/2005 tanggal 23 September 2005, hal: Pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2002, yang ditujukan kepada PT Batik ABC, Galeria Kawasan Nusa Dua Kuta, Denpasar, diperoleh petunjuk bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi terhadap objek pajak penghasilan Pasal 23 berupa komisi kepada perantara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Dua Nomor Pemb-109/WPJ.07/RP.0200.5/2004 tanggal 28 April 2004, hal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2002, yang ditujukan kepada PT Batik ABC Cabang Bandung, diperoleh petunjuk bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi terhadap objek pajak penghasilan pasal 23 berupa komisi kepada perantara;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Dua Nomor Pemb-170/WPJ.05/RP.03/A.2.01/2004 tanggal 15 april 2004, hal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2002, yang ditujukan kepada PT Batik ABC Cabang VWX Plaza XYZ, diperoleh petunjuk bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi terhadap objek pajak penghasilan Pasal 23;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan, terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa dalam perjanjian antara PT DEF dengan Pemohon Banding tidak terdapat syarat atau kondisi yang mengharuskan Pemohon Banding untuk membayarkan komisi kepada perantara, karena PT DEF mengadakan perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2002 berupa komisi kepada perantara sebesar Rp86.703.341,00;

Bahwa lebih lanjut majelis berkesimpulan bahwa PT batik ABC, dengan alamat: Galeria kawasan Nusa Dua Kuta, Denpasar dan PT batik ABC Cabang bandung, PT batik ABC cabang Dept. Store GHI-Fatmawati (Pemohon banding) merupakan cabang/counter dari PT Batik ABC, namun Terbanding tidak konsisten dalam menerapkan koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas komisi kepada perantara tetap penjualan counter (cabang) untuk masalah yang sama;

Halaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2002 berupa komisi kepada pedagang perantara sebesar Rp86.703.341,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan;

2.c.7. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-01489/PP/M.II/12/2003.

Pemohon Banding : PT ABC Indonesia

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak : 2000

Pokok Sengketa : Penetapan potongan penjualan dan komisi kepada *departement store* sebagai objek pajak.

Pendapat Majelis: Majelis berkesimpulan bahwa sengketa timbul disebabkan terdapat perbedaan penggolongan atas kegiatan usaha *counter departement store* yang menurut Terbanding adalah menjualkan barang Pemohon sehingga kegiatan *departement store* adalah sebagai jasa perantara, sedangkan menurut Pemohon adalah pembeli barang Pemohon dijual kembali sehingga kegiatan usaha *departement store* adalah jasa perdagangan;

Dengan demikian sumber sengketa adalah penerapan ketentuan yuridis fiskal atas penggolongan kegiatan usaha (*counter departement store*) bukan jumlah nilai transaksi yang menjadi objek pajak penghasilan Pasal 23;

Oleh karena barang yang di departemen store sudah menjadi milik *departement store*, maka *stock opname* yang dilakukan Pemohon hanya barang-barang yang digudang Pemohon tidak termasuk yang di *departement store*;

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena barang sudah menjadi milik *departement store*, maka *departement store* bukan menjualkan barang Pemohon, maka ketentuan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Direktur Jenderal Pajak, tidak dapat ditetapkan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian bahwa diskon yang diberikan kepada *departement store* adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli adalah benar dan sesuai praktek bisnis adalah wajar, oleh karena itu koreksi Terbanding atas objek pajak harus dibatalkan.

3. Bahwa Pernyataan Pemohon Terhadap Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00022/206/07/056/09 tanggal 10 November 2009.

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00022/206/07/056/09 tanggal 10 November 2009 berupa bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp37.586.716,00. Dengan alasan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp12.540.052.452,00 dan koreksi negatif biaya usaha sebesar Rp12.545.187.404,00. Atas dasar tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa seharusnya tidak dilakukan koreksi atas dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, sehingga seharusnya tidak terjadi kurang bayar pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 sebesar Rp89.492.180,00 dan tidak terbit Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00022/206/07/056/09 tanggal 10 November 2009.

Dengan tidak adanya Pajak Penghasilan Badan yang kurang dibayar maka seharusnya sanksi administrasi berupa Bunga Pasal 13 (2) KUP tidak ada.

Dasar Perpajakan.

Dengan demikian mohon dapat dibatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00022/206/07/056/09 tanggal 10 November 2009.

Pernyataan Pemohon terhadap Pengesampingan Kebenaran Material.

Pemohon berpendapat Majelis Hakim Banding telah mengesampingkan prinsip penting dalam perpajakan yaitu netralitas pajak. Bahwa pajak harus dipungut pada saat wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak dari penetapan pajak yang sewenang-wenang ini pada kelangsungan usaha dan kelangsungan ekonomi secara umum yang pada gilirannya akan berdampak pada penurunan potensi perpajakan, menimbulkan pengangguran, dan ketidakpercayaan calon investor pada kepastian hukum dan kualitas penyelenggara negara dalam

Halaman 41 dari 45 halaman. Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin iklim bisnis yang kondusif. Hal ini dapat dipadankan dengan pendapat seorang pakar perpajakan klasik Jean Baptiste Colbert, Menteri Keuangan Prancis pada zaman Raja Louis XIV, yang menyatakan bahwa pemungutan pajak adalah seni mencabuti bulu angsa tanpa si angsa merasa kesakitan, atau menurut pernyataan Darmin Nasution ketika akan melakukan Program *Sunset Policy* bahwa pemungutan pajak hendaknya diibaratkan dengan mengambil telur angsa bukan memotong leher angsa.

Fakta penting yang menjadi akar permasalahan dan penyebab terjadinya tindak kesewenang-wenangan berupa penetapan pajak yang sangat memberatkan dan tidak adil sama sekali tidak dipertimbangkan dan data yang ada dianggap memenuhi syarat yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan formal. Majelis Hakim tidak menggunakan informasi yang disampaikan Pemohon untuk menggali lebih dalam akar permasalahan yang menyebabkan ketidakadilan.

Kesimpulan dan Permohonan.

Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32894/PP/M.III/15/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dapat diterima, serta menetapkan kembali jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Sebesar Rp.
Pajak Penghasilan Yang Terutang	56.756.520,00
Kredit Pajak	
PPH Pasal 22	56.756.520,00
Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar	0,00
Sanksi administrasi:	0,00
a Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32894/PP/M.III/15/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-450/WPJ.07/2010 tanggal 30 April 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00022/206/07/056/09 tanggal 10 November 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. LEE COOPER INDONESIA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. LEE COOPER INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH..MSc., Hakim

Halaman 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd.

H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	5.000,00
2. Redaksi	Rp	6.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 153/B/PK/PJK/2014